

BAB 5

ANALISIS DAN KESIMPULAN

5.1 Analisis Kebijakan

Pertanyaan yang besar yang ingin coba dijawab dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai melalui KTT Asia Afrika 2005?”**. Maka itu sebelum menjawab pertanyaan penelitian ini untuk mengerucutkan masalah timbul pertanyaan **“Mengapa Indonesia memilih Asia Afrika?”**. Menurut Lentner, terdapat 3 unit analisa dalam setiap analisis politik luar negeri, yaitu aktor, lingkungan internasional dan situasi yang berkembang (domestik dan internasional).¹ Oleh karena itu penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian yaitu dengan menggunakan pisau analisa Letner dengan mencoba menjawab pertanyaan **“Mengapa Indonesia memilih Asia Afrika?”**

Pertama, unit aktor. Politik luar negeri yang dilakukan pada era pemerintahan SBY setelah memenangkan Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2004 berjalan kontinu atau merupakan kelanjutan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dapat diketahui persiapan penyelenggaraan KTT Asia Afrika 2005 telah dimulai semenjak tahun 2003 pada era kepemimpinan Megawati. Secara dasar politik luar negeri, SBY harus mengikuti platform yang telah ada, yaitu **“bebas – aktif”**. Salah mengambil keputusan dapat membuat kepemimpinannya akan berumur pendek, seperti pendahulu-pendahulunya. Oleh karena itu SBY mencoba memformulasikan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia pada saat itu yaitu pada masa paska krisis.

Kepentingan Indonesia pada masa setelah krisis adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan kembali di panggung internasional. Sebelumnya ketika kerusuhan Mei 1998 dan kejatuhan Soeharto, Indonesia berada dalam perhatian dunia. Militer Indonesia dikecam oleh dunia internasional, perekonomian Indonesia bangkrut, sistem birokrasi korup dan kehilangan kepercayaan, sistem demokrasi yang berada di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya, setelah Timor - Timur lepas dari Indonesia, keutuhan NKRI dalam bahaya dan yang paling mengkhawatirkan adalah Indonesia diambang menjadi *failed state*.

¹ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis, A Comparative and Conceptual Approach*, Columbus:Ohio, hlm. 17.

Beberapa presiden Indonesia setelah Soeharto mencoba mengembalikan kepercayaan dunia internasional meskipun dapat dikatakan hal tersebut sulit dilakukan ketika legitimasi politik dalam negeri tidak kondusif. Keuntungan SBY yang pertama adalah SBY naik menjadi Presiden RI dengan sistem *one man one vote*. Secara legitimasi, SBY telah mengungguli pendahulu-pendahulunya. Maka dengan itu, SBY dapat lebih bebas memformulasikan politik luar negerinya tanpa memikirkan legitimasi kepemimpinannya.

Pokok penting dalam memformulasikan politik luar negeri Indonesia adalah ketika ditemukannya apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia secara umum. Kepentingan Indonesia adalah memupuk kembali kepercayaan dunia internasional. Ketika kepercayaan dunia internasional telah tercapai, maka secara linear, investasi akan datang, produksi akan berjalan, pasar akan memiliki daya beli dan kerjasama akan meningkat.

Namun tidak semudah itu suatu negara meraih kepercayaan yang telah hilang dapat kembali dalam jangka waktu yang singkat. Adapun kepercayaan perlu ditumbuhkan dan memerlukan proses, Pemerintahan SBY paham akan hal ini. SBY dapat saja membuat skenario jangka panjang tanpa memanfaatkan keadaan yang ada sehingga kepercayaan itu nanti akan kembali didapatkan oleh Indonesia, tapi dalam jangka waktu berapa lama? Dapat dipastikan ketika pemerintahan SBY turun, proses tersebut masih belum dapat dipetik. Oleh karena itu SBY memanfaatkan situasi politik dunia dan disinkronkan dengan modal yang dimiliki oleh Indonesia yaitu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, demokrasi yang sukses dijalankan melalui pemilu 2004 dan nilai historis yang pernah dicapai Indonesia pada masa lalu.

Kedua, unit lingkungan internasional. Perlu dipahami bahwa wajah dunia sedang berubah semenjak serangan teroris di AS pada tahun 2001. Lebih lanjut serangan AS di Afghanistan dan Iraq telah meruntuhkan tatanan dunia yang selama ini dipercayakan kepada PBB. PBB tidak sanggup menjaga perdamaian dunia, setidaknya hal itulah yang menjadi sumber depresi hubungan antar bangsa. Jadi kesimpulannya, ketika tindakan unilateral yang dilakukan oleh AS terhadap Afghanistan dan Iraq telah dijadikan pola berpikir bersama, maka timbullah peperangan di seluruh sudut dunia.

Karena runtuhnya kepercayaan terhadap multilateralisme dan tiap negara akan bertindak unilateralisme untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Pada konsep ini, maka negara yang memiliki *Power* yang terbesar lah yang menang, meskipun hal tersebut belum mutlak.

Hal tersebut dapat terlihat ketika Hugo Chavez mulai memegang tampuk kepemimpinan di Venezuela. Secara terbuka Chavez mengkritisi dan menantang AS. Begitu pula dengan Ahmadinejad, dalam program nuklirnya. Tindakan-tindakan provokatif AS ini diambil setelah AS juga mulai kehilangan hegemoni dikarenakan objektif dari peperangannya di Afghanistan dan Iraq tidak pernah tercapai. AS dalam posisi ingin cepat-cepat mengakhiri kampanyenya di Afghanistan dan Iraq namun tidak bisa karena konflik sektarian dan terorisme akan meluas. AS juga tidak dalam posisi mencari musuh-musuh baru, namun tindakan Chavez dan Ahmadinejad tentu saja tidak membuat AS nyaman.

Kekhawatiran AS tersebut meningkat ketika dua kekuatan musuh klasiknya bersatu dan bertemu, apalagi di fora Gerakan Non Blok di Havana pada tahun 2006. Mengingat besarnya negara anggota Gerakan Non Blok, ditambah lagi dengan meningkatnya negara-negara yang mengkritisi AS dengan memiliki kekecewaan yang besar terhadap forum PBB, peserta Gerakan Non Blok akan dengan mudah digiring opininya oleh orator-orator ulung seperti Chavez dan Ahmadinejad.

Indonesia memahami dilemma AS ini dalam suatu pemikiran yang lebih luas. Oleh karena itu Indonesia mencoba memanfaatkan situasi internasional yang serba tidak pasti, dengan menawarkan suatu ide konstruktivis yang lebih menggiurkan daripada ajakan menabuh gendering perang *a la* Chavez dan Ahmadinejad. Indonesia menyadari bahwa pemimpinnya tidak dapat melawan logika pemimpin tuan rumah Gerakan Non Blok yaitu Kuba. Secara substansi, mungkin apa yang ditawarkan Indonesia lebih masuk akal, namun untuk menyandingkan kualitas orasi dari pemimpin negara seperti Hugo Chavez dan Ahmadinejad, Indonesia harus berpikir dua kali.

Lebih lanjut Indonesia juga mengerti bahwa sebagian besar Negara peserta Gerakan Non Blok merupakan negara peserta KAA 1955 yang secara historis masih memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Berangkat dari situlah Indonesia

berusaha memanfaatkan momen dengan menyelenggarakan KTT Asia –Afrika di Jakarta sebelum KTT Gerakan Non Blok di Havana dimulai. Karena dengan *privilege* sebagai negara tuan rumah, Indonesia dapat lebih mudah menggiring opini negara-negara peserta KTT Asia Afrika yang notabene juga negara-negara peserta KTT Gerakan Non Blok.

Ketiga, unit situasi yang berkembang. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, Indonesia mencoba merangkul dan memanfaatkannya menjadi momen yang menguntungkan Indonesia. Apa yang ditawarkan Indonesia melalui KTT Asia Afrika setidaknya lebih dapat diterima oleh AS sebagai negara *superpower* daripada KTT Gerakan Non Blok. Namun tidak sampai disitu saja. Indonesia tidak ingin terjebak dalam pusaran permainan politik global yang melibatkan AS dan musuh-musuhnya.

Indonesia juga tidak ingin KTT Asia – Afrika hanya menjadi acara komemorasi Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Oleh karena itu, Indonesia memformulasikan suatu bentuk kerjasama yang menggiurkan negara-negara berkembang yang berada di Benua Afrika dan Asia. Berangkat dari pemikiran tersebut Indonesia menawarkan suatu bentuk kerjasama yang lebih konkrit daripada Dasasila Bandung. Suatu bentuk kerjasama yang lebih konstruktif daripada yang ditawarkan oleh KTT Gerakan Non Blok. Pemikiran tersebut jatuh pada *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP).

Kebijakan Indonesia dalam memilih KTT Asia Afrika 2005 sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia masa SBY dapat dikatakan cukup tepat dan paling dapat diterima pada saat itu. Dalam aspek historis, dikenal dengan teori resiprokal atau pengulangan sejarah merupakan suatu hal yang dapat terjadi. Oleh karena itu sejarah dimulai ketika Perdana Menteri Indonesia menghadiri suatu konferensi yang diprakasai oleh PM Sir John Katolewala (Srilanka), Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali Bogra (Pakistan), dan U Nu (Birma) pada bulan April 1954. Undangan tersebut merupakan kesempatan yang baik sebagai suatu sarana guna mengemukakan masalah yang sudah lama dipikirkan oleh PM Ali Sastroamidjojo, yaitu melalui Konferensi Kolombo sebagai suatu forum untuk mengemukakan pentingnya terselenggara pertemuan Asia Afrika.

Setelah melalui perjuangan diplomasi yang alot dengan negara-negara peserta Konferensi Kolombo, seperti PM Srilanka, Pakistan, Birma, dan India, akhirnya setelah melalui Konferensi Bogor pada tanggal 28-29 Desember 1954, Konferensi Asia Afrika dapat diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung dengan mengundang negara-negara yang sudah merdeka sebanyak 29 negara dari Negara Asia dan Afrika dan menghasilkan Dasa Sila Bandung².

Dengan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan bukti nyata bahwa politik luar negeri Indonesia adalah aktif dan sekaligus penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat seperti diuraikan diatas. Salah satu keputusan penting Konferensi Asia Afrika di Bandung, yaitu penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dihapuskan. Hal ini memperlihatkan politik luar negeri Indonesia dengan ciri-ciri aktif dan sekaligus memperlihatkan sifat anti kolonial. Selain itu, hasil perjuangan diplomasi Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika terlihat jelas, ketika Konferensi Asia Afrika diselenggarakan baru 18 negara di Asia dan Afrika yang merdeka. Pasca Konferensi Asia Afrika, negara-negara yang merdeka bertambah menjadi 30 negara.

Melihat keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika yang kemudian dilanjutkan dalam Gerakan Non Blok (GNB), dimana Indonesia sebagai salah satu pelopor terbentuknya GNB dan mencapai klimaks ketika Indonesia menjadi ketua GNB dari tahun 1992-1995 ikut aktif berpartisipasi dengan negara-negara anggota GNB memperjuangkan kepentingan negara-negara anggotanya³.

Dengan demikian bahwa perhatian Indonesia terhadap negara berkembang dapat dikatakan sangat besar baik secara individu (bilateral) maupun kolektif (regional) melalui koalisi sesama negara berkembang mulai dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok. Walaupun secara tidak langsung Indonesia berhasil membantu negara-negara terjajah menjadi negara merdeka. Namun masih banyak Negara-negara yang baru merdeka belum berhasil melakukan pembangunan didalam negerinya dalam arti pembangunan ekonomi.

² “Asia Africa: Towards the First Century”, *op.cit.*

³ Bantarto Bantoro, *op. cit.*, hal 245

Indonesia sebagai negara yang berhasil keluar sebagai negara berkembang menjadi negara yang sukses dalam pembangunan ekonomi yang dimulai dari tahun 1967-1996, mengharuskan Indonesia membantu negara-negara berkembang yang tertinggal di Asia dan Afrika. Berdasarkan politik luar negeri yang dianut, maka Indonesia memberikan bantuan kepada negara-negara tersebut tidak hanya bantuan politik tetapi juga bantuan ekonomi berupa kerjasama ekonomi kepada negara-negara berkembang yang tertinggal terutama negara anggota Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok.

5.2 Kesimpulan

Melihat analisa di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi Indonesia mengadakan KTT Asia Afrika 2005 adalah sebagai berikut :

- Pasca Konferensi Asia Afrika 1955, terdapat kevakuman dalam kerjasama Asia-Afrika meskipun telah dihasilkan *Joint Communique* yang juga mencakup “Dasasila Bandung”. Hal ini disebabkan pasca KAA 1955 tidak ada ikatan institusional antara kedua benua sehingga prinsip-prinsip Dasasila Bandung tersebut tidak berhasil diwujudkan secara optimal.
- Sebagai pencetus lahirnya KAA 1955 merupakan kewajiban moral bagi Indonesia untuk dapat membangkitkan kembali semangat KAA 1955.
- Pada KTT ASEAN 2002 di Kamboja, Presiden Afrika Selatan Tabo Mbeki menyampaikan perlunya kerjasama Asia-Afrika.
- Adanya “ missing link” antara benua Asia dan Afrika. Berbagai forum kerjasama yang bermunculan seperti ASEM, APEC, FEALAC, AMED, ASEAN+Dialogue Partners, SwPD, namun belum ada forum kerjasama yang menghubungkan Asia dan Afrika.
- Jumlah negara di Asia dan Afrika merupakan setengah dari negara anggota PBB. Penduduk kedua benua berjumlah 73% dari populasi dunia dengan pendapatan domestic bruto sekitar 9,3 triliun dollar AS. Hal ini merupakan potensi yang besar dan sangat potensial untuk dikembangkan dalam sebuah kerjasama yang lebih konkrit.
- Munculnya berbagai *Common Global Issues* yang dihadapi oleh negara-negara di Asia-Afrika seperti halnya isu lingkungan hidup, kemiskinan, terorisme,

penyakit menular merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama-sama melalui *sharing of best practices* dan *capacity building* yang lebih optimal.

Dilihat dari motivasi Indonesia maka dapat dijawab pertanyaan penelitian yaitu KTT Asia Afrika 2005 dapat mengakomodir Kepentingan Nasional Indonesia karena:

Secara umum:

- Meningkatkan postur politik Indonesia dimata dunia internasional;
- Membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika terutama di tiga bidang kerjasama yaitu politik, ekonomi, dan budaya;
- Mengkanalisis berbagai kerjasama antara negara-negara AA yang telah dibangun sebelumnya;
- Memberikan wahana untuk *exchange of information and sharing of best practices and experiences* antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Afrika.
- Hubungan Indonesia dengan Afrika yang semakin kuat , baik secara bilateral maupun melalui mekanisme NAASP, bukanlah sebuah kebetulan sebaliknya NAASP mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia membutuhkan Afrika dan Afrika bahkan membutuhkan Indonesia lebih banyak (saling membutuhkan).
- Afrika memang masuk dalam kategori kawasan termiskin di dunia, tetapi ia memiliki aspirasi terkuat dalam hal solidaritas dan persatuan. Indonesia dapat memasukkan dan menggunakan sentimen semacam itu dalam politik luar negerinya terhadap Afrika untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang lebih tinggi. Mungkin dengan cara demikian Indonesia dapat “melanggengkan” kehadirannya di kawasan Afrika.

Secara khusus, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dunia kepada Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya negara-negara yang ingin melakukan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya dengan Indonesia meskipun dalam kerangka kerja NAASP.

Melihat kesimpulan dan *outcome* dari kerangka kerja sama NAASP di atas, dapat dikatakan kampanye *Soft Power* Indonesia dalam KTT Asia Afrika berjalan dengan baik. Meski demikian, *Soft Power* merupakan proses yang berkesinambungan dan memerlukan kesabaran serta konsistensi.

Meskipun banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari penyelenggaraan KTT Asia Afrika dan kerjasama NAASP, masih terdapat kendala yang dapat menghambat proses kerjasama NAASP, diantaranya adalah:

- Kurangnya *sense of ownership* atau rasa memiliki negara-negara Asia-Afrika terhadap kerjasama NAASP sehingga kurangnya perhatian dari pemerintah masing-masing negara dalam upaya implementasi kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan.
- Kurangnya diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diimplementasikan masing-masing negara sehingga tidak ada dukungan yang memadai atas pelaksanaannya.
- Rendahnya kemampuan pendanaan sebagian besar negara-negara Asia-Afrika untuk melaksanakan berbagai program yang telah disepakati.
- Adanya perbedaan kepentingan politik antara negara-negara partisipan NAASP.
- Beberapa negara berusaha mempolitisir NAASP untuk kepentingan negara tersebut.

5.3 Rekomendasi

Sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut untuk dapat megimplementasikan rencana aksi dan kegiatan dalam kerangka kerjasama NAASP, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

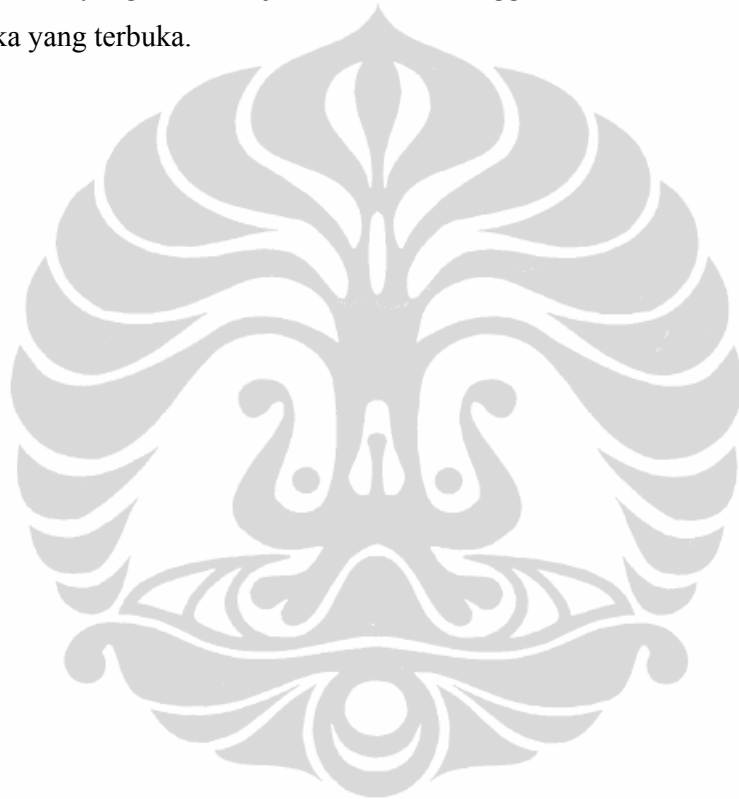
- Mendorong negara-negara NAASP untuk bekerjasama di forum-forum internasional yang melibatkan negara-negara anggota dengan dukungan dari NAASP.
- Mendorong organisasi sub-regional dan organisasi ekonomi internasional untuk bekerjasama dalam menyokong hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di kawasan Asia dan Afrika, terutama dalam realisasi kegiatan yang membutuhkan bantuan pihak ketiga.
- Mendorong masyarakat madani agar berinisiatif melakukan kegiatan-

kegiatan dalam kerangka kerjasama Asia-Afrika yang akan meningkatkan dan memperkuat interaksi *people to people*.

- Memperluas spektrum kerjasama Indonesia dengan negara - negara Afrika kunci, tanpa in tensi untuk mengabaikan negara-negara Afrika lainnya yang tidak masuk dalam kategori kunci.
- Mempertegas kembali alasan fundamental hubungan antara Indonesia dan Asia Afrika, yaitu: tanpa pamrih (*sincerity*), solidaritas, kerjasama dan pembangunan bersama (*common development*).
- Politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika perlu memunculkan komitmen untuk merubah paradigma pembangunan , yaitu dari paradigma pembangunan konvensional ke paradigma pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan yang berkelanjutan menuju negara berkembang yang bebas kemiskinan.
- Mempertahankan kesetaraan dalam kemitraan Indonesia dengan Afrika adalah penting, tetapi itu tidak membatasi Indonesia untuk memilih negara-negara Afrika tertentu yang potensial meningkatkan dan memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan.
- Memperluas operasi *intelligence marketing* Indonesia di Afrika antara lain untuk mencari peluang pasar dan investasi yang lebih besar.
- Menerapkan diplomasi *Soft Power* secara lebih terfokus dan tidak terbatas hanya kepada negara-negara Afrika kunci.
- Memperbaharui kepentingan Indonesia terhadap Afrika sejalan dengan semakin luasnya kehadiran kekuatan-kekuatan ekonomi global di kawasan.
- Menjajagi kemitraan strategis secara bilateral dengan negara-negara Asia Afrika tertentu, meskipun bukan negara kunci, sebagai instrumen untuk mempromosikan kepentingan nasional Indonesia, sekaligus sebagai pilar “permanen” kehadiran Indonesia di kawasan terutama di Afrika dan Timur Tengah.
- Dengan keunggulan yang dimiliki, Indonesia harus membuka pintu kerjasama seluas mungkin agar dapat memberi kontribusi secara berarti kepada kemakmuran dan pembangunan Asia Afrika.
- Memperbaharui kepentingan Indonesia terhadap Afrika dengan melibatkan upaya revitalisasi, re-orientasi dan strategi politik luar negeri Indonesia

terhadap Asia - Afrika.

- Memperkuat platform kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya seperti BI – SARB, IAPD, dll. Kerja sama strategis tersebut sudah seharusnya dibina lebih lanjut, sehingga target pencapaian dapat diraih dengan lebih efisien karena tidak perlu dimulai dari awal lagi.
- Meningkatkan Kerja Sama Budaya dengan negara – negara Asia Afrika untuk memperkuat solidarisme politik dan juga pembentukan unit – unit ekonomi kreatif yang bisa menjadi komoditas unggulan baru Indonesia di pasar Afrika yang terbuka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bandoro, Bantarto (ed.), “Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru”, Jakarta: CSIS, 1994.

Budiarjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, 1995.

Universitas Indonesia

Politik luar..., F.X. Wawolangi, FISIP UI, 2010.